

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum merdeka belajar memiliki konsep terbentuknya kemerdekaan dalam berpikir. Saat kita hidup di era digitalisasi saat ini, teknologi memengaruhi kualitas pendidikan. Dimana baik guru maupun siswa menggunakan perangkat pembelajaran digital dalam setiap aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki kebebasan untuk belajar secara mandiri dan menggunakan pengetahuan mereka sebaik mungkin. Kebebasan ini dapat memberi peluang kepada siswa untuk belajar sebanyak mungkin (Juliati Boang Manalu, 2022:80-86).

Dalam tujuannya sebagai usaha pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka juga memberikan kewenangan teruntuk guru dalam memilih serta menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang diperlukan pada sebuah lembaga pendidikan, sehingga peserta didik dapat mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya (Hikmah Bayani Situmorang dkk,2023:117-20. Dalam kegiatan proses belajar mengajar di SMP Nurul Huda Kota Bengkulu masih belum menggunakan media saat belajar dalam kelas sehingga proses belajar menjadi membosankan siswa juga kurang aktif saat belajar,

guru masih belum memahami seperti apa cara menerapkan kurikulum merdeka kepada siswa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Allah swt berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : Dan dia mengerjakan kepada adam nama-nama (benda- benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, “sebutkanlah kepada ku mana benda-benda itu jika kamu memang benar orang- orang yang benar (Q.S Al-Baqarah, 31).

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam pendidikan tercantum dalam tujuan pendidikan nasional ke dalam Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal III Tahun 2003, yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-undang Ri, 2003). Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Menurut sistem pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003, dijabarkan bahwasannya pendidikan ialah sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan bakat dan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa dan negara yang bermataabab (Afril Guza,2009:5). Dengan demikian, sistem pendidikan Indonesia hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru sebagai seorang pendidik, seperti mengubah kurikulum, membuat sistem proses belajar mengajar yang lebih baik, dan mengembangkan sarana pendidikan.

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut dan sistem kemajuan pendidikan yang ada tentunya tidak terlepas dari peran sistem pendidikan di Indonesia. Maka adanya

pembaruan yakni kurikulum merdeka merupakan sebuah gagasan yang memberikan kelonggaran kepada guru dan juga siswa untuk menentukan sendiri sistem pembelajaran yang akan diterapkan (Choirul Ainia Dela dkk, 2020:95). Dalam perjalanan sistem pembelajaran selama ini, dirasa proses belajar mengajarnya sangat kaku, dimana dalam penerapannya sebagian besar murid mendengarkan dan guru yang menjelaskan. Maka sistem seperti ini kebanyakan akan berkuat kepada pengetahuan namun minim keterampilan. Sedangkan lingkup dalam pendidikan teramat luas yakni juga mencakup sikap.

Pada masa kemerdekaan diberi nama kurikulum 1947 istilah “leerplan” dalam bahasa belanda berarti rencana pelajaran, dan dalam istilah inggris *curriculum* kurang dikenal di masyarakat. Kurikulum 1947 hanya menekankan pendidikan karakter, seperti menumbuhkan rasa nasionalisme, daripada aspek kognitif. Komponen berikutnya yang menjadi tujuan utama dari kurikulum rentjana pelajaran 1947. Pada tahun 1952 kurikulum di indonesia di ubah dan dikenal sebagai kurikulum 1952. Kurikulum ini membuat setiap mata pelajaran lebih rinci, dan disebut “Rentjana Pelajaran Terurai 1952” dan tidak menggunakan istilah kurikulum.

Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 diperbarui kembali. Pada Rentjana pendidikan 1964 Konsep

pembelajaran aktif, kreatif dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan. Konsep ini berarti bahwa semua sekolah harus memberikan bimbingan kepada anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap berbagai masalah yang ada (Farah Dina Insani, 2019: 47-49). Kurikulum 1968 dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan karena kurikulum yang terkesan di dominasi oleh kepentingan tertentu. Untuk menerapkannya, kurikulum ini diberikan kepada setiap sekolah atau guru dan hanya mencakup tujuan materi, metodik dan evaluasi secara nasional.

Setelah munculnya keputusan MPR No. II/MPR/1973 maka dibuatlah kurikulum baru yaitu kurikulum 1975 dalam kurikulum ini, memiliki konsep pendidikan yang ditentukan dari pusat, sehingga guru tidak perlu memikirkan konsep pembelajaran yang akan digunakan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, menjelang tahun 1983 kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga pada tahun 1984 dibuatlah kurikulum yang baru yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini unik karena pendekatan pembelajarannya yang berpusat pada anak didik melalui pembelajaran aktif siswa atau juga dikenal sebagai CBSA (M Asri, 2017:197).

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 ini mengubah sistem pembagian waktu pelajaran dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan, yang membagi materi dalam satu tahun menjadi tiga tahap. Di harapkan bahwa ini akan memungkinkan siswa untuk mendapatkan cukup banyak materi pelajaran. Selanjutnya kurikulum 2004 ini disebut kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi berfokus pada meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah di tetapkan.

Kurikulum tahun 2006 di sebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Guru lebih diberi kebebasan untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan situasi siswa, sekolah, dan lingkungannya. Ini karena departemen pendidikan nasional telah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD), standar kompetensi lulusan (SKL), dan kerangka dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran di sekolah (Ida Mawaddah, 2019:294-295). Yang terakhir, kurikulum 2013 menggabungkan kurikulum sebelumnya dengan mengutamakan pencapaian kompetensi siswa dengan berlandaskan pada potensi individu dan kurikulum ini menyatukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran (Maryatul Kiptiyah, dkk, 2021:57).

Setiap kurikulum memiliki masalahnya sendiri pada kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan tentang cara berpikir, tetapi hanya tentang watak dan bermasyarakat oleh karena itu mata pelajaran yang di berikan pada kurikulum ini adalah tentang revolusi, politik, dan sikap. Pada kurikulum 1952 materi hanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, kurikulum 1964, para pendidik menghadapi kesulitan karena sistem pembelajarannya dianggap tidak efektif dan menggunakan sistem pendidikan pancasila. Pada kurikulum 1975 sangat menekankan tujuan pendidikan yang lebih efektif di indonesia. Walau bagaimanapun kurikulum ini banyak di kritik oleh pendidik karena di anggap membuat guru sibuk membuat rencana pendidikan (Anggi Frastika, dkk, 2022: 22-23).

Problem yang terdapat pada kurikulum 1984 banyak sekolah menghadapi masalah dalam menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah siswa terlibat dalam diskusi dan membuat suasana gaduh di ruang kelas, di sana-sini ada tempelan gambar, dan guru tidak lagi mengajar model ceramah, penolakan CBSA akhirnya muncul. Selanjutnya kurikulum 1994 perpaduan antara tujuan dan proses tidak terjadi. Oleh karena itu, banyak kritik yang muncul karena beban pendidikan siswa yang terlalu tinggi baik di tingkat nasional maupun lokal (Alhamuddin, 2014: 52). Kurikulum 2004 adalah kurikulum yang berbasis potensi yang menuntut

setiap siswa untuk mencapai atau memenuhi potensi yang digariskan dalam kurikulum, namun bagaimana kita bisa memastikan bahwa siswa telah mencapai potensi mereka.

Permasalahan pada kurikulum 2006, sekolah dalam hal ini guru harus dapat mengembangkan silabus dan menilainya sesuai dengan keadaan sekolah dan daerahnya. Dan yang terakhir permasalahan pada kurikulum 2013 guru di minta merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan menetapkan kompetensi (Alhamuddin, 2014: 52).

Menyikapi hal tersebut menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mencetuskan kebijakan merdeka belajar yang menghasilkan sejumlah produk. Pada episode ke 15 di umumkan produk yaitu kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Pada Februari 2022 kurikulum merdeka resmi di berlakukan. Pada saat ini kemendikbudristek telah memberikan tiga opsi kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum yang sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi kebutuhan pembelajaran masing-masing satuan pendidikan. Tiga pilihan tersebut yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang telah menjadi kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013/2014.

Kurikulum darurat adalah kurikulum untuk pemulihan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang digunakan pada kondisi khusus dan memiliki prinsip diverifikasi yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Namun kurikulum ini telah di sederhanakan dan di terapkan selama masa pembelajaran *covid-19*. Sedangkan kurikulum merdeka yang sebelumnya di kenal sebagai kurikulum *prototype* kemudian di kembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, yang berfokus pada materi dasar dan pengembangan kompetensi dan karakter siswa.

Program yang diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengundang banyak perhatian dari kalangan pemerhati pendidikan. Salah satunya yakni Darmayani dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa :

“Merdeka belajar bisa dikatakan merupakan otonomi dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi pendidikan mulai dihidupkan kembali di era ini. Memerdekakan unit pendidikan, memerdekakan guru, memerdekakan peserta didik dapat merangsang munculnya inovasi-inovasi baru. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dan kreatif, sehingga seluruh peserta didik Indonesia yang beraneka ragam suku dan kebudayaan dapat memiliki ragam cara belajarnya masing-masing. Diungkapkan oleh Yuli Bangun Nursanti Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri fokus dari Merdeka belajar adalah terletak pada proses pembelajaran. Saat ini dalam proses pembelajaran masih banyak kita jumpai peserta didik yang belum bisa memberikan pemikiran secara analisis. Dalam Merdeka belajar diharapkan dapat dikembangkan cara berfikir kritis dan analitis” (Purwoko Agung, 2020: 5).

Selain itu banyak juga seorang kritikus pendidikan yang memiliki pandangan kurang lebih sama terkait konsep merdeka belajar. Salah satunya ialah Paulo Freire, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas mengungkapkan bahwa pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari berbagai macam penindasan dan ketertindasan. Dari ungkapan sudut pandang ini, Paulo menganggap bahwa pendidikan juga terkait pengembangan aspek-aspek kemanusiaan, dll (Eka Prasetya Berkamsyah, 2021: 5). Dari beberapa pendapat tersebut, secara garis besar pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan. Kebebasan dalam menyampaikan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap individu

Salah satu masalah atau kesulitan dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah bagaimana guru membuat perencanaan pembelajaran ini memerlukan analisis capaian pembelajaran yang akan dicapai siswa karena di buat per fase. Selanjutnya, mereka harus membuat perencanaan

dalam bentuk tujuan pembelajaran (TP) dan menggabungkannya dengan alur tujuan pembelajaran (ATP). Selain itu, guru yang tidak mahir menggunakan teknologi dengan baik akan menghadapi kesulitan saat membuat RPP. Guru masih menghadapi masalah dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat bagi anak agar pembelajaran menyenangkan dan siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran (Sumarni, 2023: 98).

Kurangnya pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk para pendidik. Ketika tidak adanya BIMTEK (bimbingan teknis) dari pemerintah kesempatan guru untuk mendapatkan pedoman yang lebih baik untuk menerapkan kurikulum merdeka dapat berkurang (Achmad Zurohman dan Desi Anisatul Hasanah, 2023: 40). Kesalahpahaman dalam mengartikan Proyek Profil Pancasila terkadang ada guru yang beranggapan bahwa Proyek Profil Pancasila itu akhir dari prosesnya merupakan sebuah produk atau barang. Padahal pada proyek Pancasila tidak ditekankan bahwa produk yang dihasilkan itu harus berupa benda, namun peserta didik memiliki karakter yang baik. Guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional (Diyah Nadiyah dan Heni Pujiastuti, 2023: 3138-3140).

Nu'man Somantri mendefinisikan pendidikan IPS di sekolah sebagai penyederhanan atau adaptasi dari disiplin

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. IPS merupakan perpaduan/ integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial (sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, ilmu politik, filsafat, psikologi) dan humaniora yang disusun secara sistematis untuk tujuan pendidikan di sekolah. Penjelasan ini mempertegas bahwa IPS tidak sama dengan ilmu-ilmu sosial, akan tetapi ada hubungan yang erat antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial. IPS tidak bisa dipisahkan dari disiplin ilmu-ilmu sosial (Musyarofah, 2021: 1-2).

Berdasarkan studi pendahuluan dan hasil observasi, SMP Nurul Huda Kota Bengkulu merupakan salah satu sekolah yang dianjurkan untuk menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2020. Akan tetapi tidak untuk seluruh kelas, yang menerapkan kurikulum merdeka hanya kelas VII dan VIII hal ini dikarenakan kelas IX masih melanjutkan kurikulum yang sebelumnya yakni kurikulum 2013. Kondisi pembelajaran di SMP Nurul Huda cukup baik kegiatan pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, siswa kurang aktif saat belajar sehingga kegiatan belajar mengajar terasa membosankan. Dalam penerapan kurikulum merdeka di SMP Nurul Huda Kota Bengkulu terdapat beberapa perubahan terutama pada sistem pembelajarannya,

Dimana kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih berbagai perangkat ajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Namun kebijakan ini juga memiliki kelemahan dimana tidak semua guru faham akan pembelajaran diferensiasi dikarenakan perubahan kurikulum yang masih baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Mekiyansyah selaku guru SMP Nurul Huda Kota Bengkulu terdapat salah satu problem dalam penerapan kurikulum merdeka seperti kurangnya pemahaman mengenai kurikulum merdeka, problem yang selanjutnya mengenai penyusunan modul ajar yang belum terlalu memahami bagaimana cara penyusunannya, dalam kegiatan pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi (Wawancara Senin 21 Agustus, 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana proses penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS di SMP Nurul Huda Kota Bengkulu?
2. Apa saja problematika penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS di SMP Nurul Huda Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS di SMP Nurul Huda Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi oleh guru dalam penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS di SMP Nurul Huda Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian berikut yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan dalam penerapan kegiatan pembelajaran untuk pencapaian tujuan yang belum tercapai dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga, khususnya dalam penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS di SMP Nurul Huda Kota Bengkulu.

- b. Bagi guru, ilmu pengetahuan sosial diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai alternatif sumber bahan pembelajaran dalam penerapan dan upaya mengatasi problematika yang ada dalam dunia pendidikan.
- c. Bagi civitas akademik, diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya civitas akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti dan pembaca yang ingin mengkaji lebih spesifik tentang problematika penerapan kurikulum merdeka dan diharapkan mampu menjadi acuan perbaikan dan pengembangan berbagai penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematik* yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, *problema* berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi atau disesuaikan. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, problematika mempunyai arti: masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan. Sedangkan Syukir menyatakan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat diselesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.

2. Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang diterbitkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran yang mengutamakan bakat dan minat peserta didik yang dapat menumbuhkan sikap kreatif dan menyenangkan pada peserta didik.

3. Mata Pelajaran IPS

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora seperti, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dibangun atas dasar realitas dan fenomena sosial. Di sekolah mata pelajaran IPS harus lebih menekankan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa (Sapriya, 2009: 67). Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS) sebagai mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik merupakan mata pelajaran yang disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu, sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.

